

Jurnal Ekonomi

VOLUME XVIII / 01 / 2013

ISSN : 0854 - 9842

Daftar Isi

Pemilihan Umum Dalam Perspektif Ekonomi

Latif Adam, Maxensius Tri Sambodo & Siwage Dharma Negara

Pengujian *Conditional Beta Convergence* Di Indonesia

Yusi Yusianto & Keni

Mobilitas Penduduk Dan Barang Dari Wilayah *Hinterland* Ke Kota Manado

Syarwani Canon

Pengaruh Indikator Krisis Keuangan Global dan Kondisi Pasar Modal Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Di Bursa Efek Indonesia

Indra Abdul Mugni & Bambang Sudyatno

Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Petani

Perkebunan Kelapa Sawit Di Lampung

R. Bambang Budhijana

Pengaruh Realisasi Belanja Modal, *Fiscal Stress*, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

(Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Propinsi Kalimantan Timur)

Rinaldi & Nuryasman MN

Disparitas Antar Wilayah Dan Provinsi Di Indonesia Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah

Yanuar

Pengaruh Krisis Keuangan Global Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Regional Asia Dan Bisnis di Indonesia

Andreas Bambang Daryatno & Ishak Ramli

Peranan Desentralisasi Fiskal Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Studi Kasus: Provinsi Riau, DKI Jakarta Dan Kalimantan Timur 2010-2012

Iwan Prasodjo

JURNAL EKONOMI

VOLUME XVIII/01/Maret/2013

ISSN0854-9842

Terbit tiga kali setahun pada bulan Maret, Juli dan November. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analisis-krisis di bidang Ilmu Ekonomi.

Penanggungjawab

Agus Zainul Arifin, Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta

Ketua Dewan Penyunting

Carunia Mulya Firdausy, Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta

Anggota Penyunting

Yanuar, Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta

R. Bambang Budhijana, Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta

Nuryasman, Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta

Penyunting Kehormatan (Mitra Bebestari)

J. Supranto, Fakultas Ekonomi Universitas Persada Indonesia (YAI) Jakarta

Indra Suhendara, Fakultas Ekonomi & Bisnis UPI, Bandung

Siti Herni Rochana, Fakultas Ekonomi Universitas Parahyangan Bandung

Eka Purwanda, STEMBI Bandung

Agus Eko Nugroho, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta

Eddy Herjanto, Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Tarumanagara

Sekretaris Editorial

Christine C. Widya

Alamat Penyunting dan Tata Usaha: Sekretariat Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta, Kampus II Gedung B Lantai 3, Jln. Tanjung Duren Utara No. 1 Jakarta Barat 11470 Telepon (021) 5655508-10-14-15 pesawat 0326 dan Fax. (021)5655521. email: maksi@tarumanagara.ac.id / jurnal@fe.tarumanagara.ac.id

Jurnal Ekonomi diterbitkan sejak tahun 1996 oleh Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta.

Dicetak di Percetakan Candi Mas Metropole-Jakarta. Isi di luar tanggung jawab Percetakan

PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF EKONOMI

Latif Adam, Maxensius Tri Sambodo & Siwage Dharma Negara

1 - 16

PENGUJIAN *CONDITIONAL BETA CONVERGENCE* DI INDONESIA

Yusi Yusianto & Keni

17 - 35

MOBILITAS PENDUDUK DAN BARANG DARI WILAYAH *HINTERLAND*
KE KOTA MANADO

Syarwani Canon

36-47

PENGARUH INDIKATOR KRISIS KEUANGAN GLOBAL DAN KONDISI
PASAR MODAL TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN DI
BURSA EFEK INDONESIA

Indra Abdul Mugni & Bambang Sudiyatno

48-64

STRATEGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PETANI
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI LAMPUNG

R. Bambang Budhijana

65 - 76

PENGARUH REALISASI BELANJA MODAL, *FISCAL STRESS*, PRODUK
DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) TERHADAP KEMANDIRIAN
KEUANGAN DAERAH (Studi empiris pada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Timur)

Rinaldi & Nuryasman

77 - 96

DISPARITAS ANTAR WILAYAH DAN PROVINSI DI INDONESIA
SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH

Yanuar

97 - 108

PENGARUH KRISIS KEUANGAN GLOBAL TERHADAP INDEKS HARGA
SAHAM GABUNGAN REGIONAL ASIA DAN BISNIS DI INDONESIA

Andreas Bambang Daryatno & Ishak Ramli

109 - 121

PERANAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
STUDI KASUS: PROVINSI RIAU, DKI JAKARTA DAN KALIMANTAN
TIMUR 2010-2012

Iwan Prasodjo

122 - 136

**PENGARUH REALISASI BELANJA MODAL, *FISCAL STRESS*, PRODUK
DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) TERHADAP KEMANDIRIAN
KEUANGAN DAERAH**
(Studi empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan
Timur)

Rinaldi & Nuryasman MN

*Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah, Sukabumi & Fakultas Ekonomi,
Universitas Tarumanagara, Jakarta*

Email: didi.alislami@gmail.com & nuryasmanmn@gmail.com

Abstract: The goal of the research is to analysis function relates to effects of capital expenditure, fiscal stress, GRDP changes to regional East Kalimantan' financial independence as simultaneously or partial as well. The research objects are capital expenditures, total local own revenues and total local revenues as stated in financial operation statement in Indonesia. Degree of fiscal decentralization was used as indicator of the new regencies' financial independence. Ratio of own local revenues and total local revenues was used to measure the degree of fiscal decentralization. This study uses secondary data from panel data for 4 (four) years from 2006 to 2009 from 13 districts/cities in Indonesia division. Data analysis methods used in this study is to Multiple Linear Regression by using application program SPSS version 17. Data obtained from the Supreme Audit Board (BPK) of East Kalimantan Province and the Central Bureau of Statistics (BPS) of East Kalimantan Province. The data analyzed in this study are compiled from reports Actual Revenue and Expenditure (Budget). The results showed that the Capital Expenditures, Fiscal Stress and GRDP simultaneously significant effect on the Independence of Financial District/City in East Kalimantan Province. Partially Capital Expenditures no signficant but positive effect, Fiscal Stress no significant but positive effect, while the GRDP has significant and positive impact on Independence Financial District/City in East Kalimantan province.

Keywords: Capital Expenditures, Fiscal Stress, Gross Regional Domestic Product (GRDP), Financial Independence, Self Revenue, Total Revenue.

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk fungsi analisis berkaitan dengan efek dari belanja modal, stres fiskal, perubahan PDRB menuju kemandirian finansial Kalimantan Timur daerah secara simultan atau parsial juga. Obyek penelitian adalah belanja modal, total pendapatan asli daerah dan total pendapatan daerah sebagaimana tercantum dalam laporan operasi keuangan di Indonesia. Derajat desentralisasi fiskal digunakan sebagai indikator kemandirian keuangan kabupaten baru. Rasio pendapatan asli daerah dan total pendapatan daerah digunakan untuk mengukur derajat desentralisasi fiskal. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari data panel selama 4 (empat) tahun 2006-2009 dari 13 kabupaten/kota di divisi Indonesia. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk Regresi Linier Berganda dengan menggunakan aplikasi program SPSS versi 17. Data yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur. Data yang dianalisis dalam penelitian ini diolah dari laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja (APBN). Hasil penelitian menunjukkan

bahwa Belanja Modal, Stres Fiskal dan PDRB secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian *Financial District*/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Pengeluaran Sebagian Capital tidak signifikan namun positif efek, Fiscal Stress tidak signifikan, namun efek positif, sedangkan PDRB memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap Kemerdekaan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Kata kunci: Belanja Modal, Fiscal Stress, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Financial Independence, Self Pendapatan, Jumlah Pendapatan.

PENDAHULUAN

Dinamika pembangunan di Indonesia, salah satunya ditandai dengan berubahnya sistem pemerintahan yang semula bersifat sentralisasi, kini bersifat desentralisasi yang dikenal dengan istilah Otonomi daerah. Otonomi daerah yang mulai diimplementasikan tahun 2001 yang lalu ini menghendaki adanya perubahan yang mendasar pada Sistem Pemerintahan Indonesia. Melalui Otonomi daerah, kewenangan pemerintah pusat dalam beberapa bidang didelegasikan menjadi kewenangan daerah (*desentralisasi*) termasuk kewenangan dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Mardiasmo (2004: 96), kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. *Pertama*, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidak merataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia. *Kedua*, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah.

Permasalahan yang ada di propinsi Kalimantan Timur, masih rendahnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh oleh daerah kabupaten.kota. Hal ini disebabkan besarnya Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) yang diterima dari pusat, sebagaimana daerah tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam yang banyak. Sehingga disatu sisi kurangnya motivasi daerah untuk menggali potensi daerah masing-masing untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Akibatnya dengan demikian tetap saja daerah tersebut memiliki ketergantungan yang besar terhadap dana perimbangan yang berasal dari pusat.

Penelitian Erna Rositah (2009) menunjukkan bahwa daerah kabupaten Malinau di Kalimantan Timur memiliki kesempatan yang sama untuk membangun kesejahteraan masyarakatnya. Meskipun kekayaan sumber daya alam terutama hutan melimpah (4,2 juta ha), pada kenyataannya Malinau belumlah mampu menjamin kehidupan dan penghidupan yang lebih baik bagi sebagian besar masyarakatnya. Populasi penduduk di kabupaten ini pada akhir tahun 2003 berjumlah 43.844 jiwa tersebar di sembilan wilayah kecamatan dan sebagian besar hidup dan tinggal di desa-desa pelosok, di dalam dan sekitar hutan. Pada tahun yang sama tercatat sekitar 47% rumah tangga atau keluarga miskin di kabupaten paling utara Kalimantan Timur ini (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Malinau, 2003). Rendahnya sumber daya masyarakat berpengaruh pula terhadap kecilnya peluang dan daya saing masyarakat secara ekonomi dan sosial termasuk memanfaatkan kesempatan untuk bekerja di lingkungan pemerintahan, bahkan kemampuan mengakses

birokrasi. Ketidaksiapan masyarakat lokal dalam menghadapi modernisasi juga menjadi salah satu faktor yang semakin memarjinalkan posisi mereka secara ekonomi politik. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain: Belanja untuk perolehan tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan Bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya (Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005).

Belanja Modal yang diteliti disini adalah belanja jalan, irigasi dan jaringan yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur fisik daerah dan sarana public services guna mendukung aktivitas perekonomian dan manfaatnya dirasakan dimasa datang, sehingga ada time lag x (tahun), y (tahun $t+1$). Hal ini berarti Belanja Modal yang digunakan untuk membangun infrastruktur dan pelayanan publik merupakan akselator atau *Multiplier Effect* bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi serta potensi pengenaan pajak dan redistribusi, yang akhirnya bermuara kepada peningkatan kemandirian keuangan daerah.

Beberapa daerah yang termasuk daerah kaya, dimana memiliki sumber-sumber penerimaan yang potensial, yang berasal dari pajak, retribusi daerah, maupun ketersediaan sumber daya alam yang memadai yang dapat dijadikan sumber penerimaan daerah. Namun, disisi lain bagi beberapa daerah, otonomi bisa jadi menimbulkan persoalan tersendiri mengingat adanya tuntutan untuk meningkatkan kemandirian daerah. Daerah mengalami peningkatan tekanan fiskal (*Fiscal Stress*) yang lebih tinggi dibanding era sebelum otonomi. Daerah dituntut untuk mengoptimalkan setiap potensi maupun kapasitas fiskalnya dalam rangka untuk mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Pada saat *Fiscal Stress* tinggi, pemerintah daerah cenderung menggali potensi penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan daerahnya (Shamsud dan Akoto, 2004). Oleh karena itu, tingginya angka upaya pajak dapat diidentikkan dengan kondisi *Fiscal Stress*. Upaya Pajak (*Tax Effort*) adalah upaya peningkatan pajak daerah yang diukur melalui perbandingan antara hasil penerimaan (realisasi) sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. *Tax Effort* menunjukkan upaya pemerintah untuk mendapatkan pendapatan bagi daerahnya dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki. Potensi dalam pengertian ini adalah seberapa besar target yang ditetapkan pemerintah daerah dapat dicapai dalam tahun anggaran daerah tersebut.

Penelitian Haryadi (2002) menunjukkan *Fiscal Stress* secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebelum dan sesudah krisis. Hasil dari penelitian tersebut adalah tingkat kemampuan pembiayaan daerah sebelum krisis relatif lebih besar dibandingkan sesudah krisis, dari segi kemampuan mobilisasi daerah relatif lebih baik sesudah krisis, dari segi tingkat ketergantungan secara relatif menunjukkan perkembangan yang positif sesudah krisis.

Penelitian lain terkait dengan *Fiscal Stress* dilakukan oleh Andayani (2004), hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan rata-rata pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota sebelum dan sesudah adanya krisis. Pada masa krisis ekonomi, rata-rata pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota mengalami penurunan yang signifikan. Penerimaan daerah yang tidak stabil selama krisis ekonomi menyebabkan adanya kondisi *Fiscal Stress* (Tekanan Keuangan), sehingga terjadi penurunan rata-rata pendapatan dan belanja daerah.

Gambaran perekonomian secara makro suatu daerah diperlihatkan oleh nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang merupakan penjumlahan nilai tambah bruto dari sektor ekonomi yang berperan dalam kegiatan perekonomian tersebut. PDRB Kabupaten/Kota di propinsi Kalimantan Timur, juga merupakan cerminan ekonomi makro Kabupaten/Kota di propinsi Kalimantan Timur. Struktur ekonomi Kabupaten/Kota di propinsi Kalimantan Timur diperlihatkan oleh perkembangan kontribusi sektor-sektor dalam pembentukan PDRB menurut lapangan usaha, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Perkembangan PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%) Propinsi Kalimantan Timur, Tahun 2006-2009

No	Lapangan Usaha	2006	2007	2008	2009	Rata2 (%)
1.	Pertanian	5,41	5,78	4,89	5,76	5,46
2.	Pertambangan &Penggalian	41,89	42,94	46,16	47,13	44,53
3.	Industri & Pengolahan	35,98	33,63	33,09	26,78	32,37
4.	Listrik, Gas & Air bersih	0,29	0,29	0,24	0,24	0,26
5.	Bangunan	2,35	2,57	2,14	2,71	2,44
6.	Perdagangan, hotel, restoran	6,39	6,57	5,79	7,74	6,62
7.	Angkutan & Komunikasi	3,46	3,54	2,98	3,74	3,43
8.	Keuangan, Persewaan & jasa usaha	1,75	2,04	1,81	2,25	1,96
9.	Jasa-jasa	2,49	2,64	2,91	3,61	2,91

Sumber: BPS, Propinsi Kalimantan Timur

Dari data pada tabel 1 dapat dilihat bahwa perkembangan sektor ekonomi terhadap PDRB tertinggi diperoleh dari sektor pertambangan & penggalian, dengan rata-rata sebesar 44,53%. Disamping itu sektor industri dan pengolahan juga memberikan kontribusi terhadap PDRB dengan rata-rata sebesar 32,37%. Sedangkan kontribusi terendah dari sektor ekonomi terhadap PDRB adalah sektor listrik, Gas dan Air Bersih dengan rata-rata sebesar 0,26%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perekonomian secara makro di propinsi Kalimantan Timur didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, serta industri dan pengolahan. Perkembangan ekonomi melalui sektor-sektor dalam PDRB yang pernah dilakukan penelitian oleh Elia Radianto (1997) dalam (Pudji Suprajitno, 2003), menyimpulkan bahwa tingkat perkembangan ekonomi (sektor industri & pengolahan, perdagangan, pengangkutan dan komunikasi) baik jangka pendek maupun jangka panjang mempunyai pengaruh positif terhadap derajat kemandirian fiskal daerah. Semakin tinggi perkembangan ekonomi suatu daerah maka semakin tinggi pula derajat kemandirian fiskal daerah.

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Apakah realisasi Belanja Modal, *Fiscal Stress*, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh secara parsial terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Timur.; (2) Apakah realisasi Belanja Modal, *Fiscal Stress*, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh secara simultan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Timur.

Otonomi Daerah. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan kemerdekaan atau kebebasan menentukan aturan sendiri berdasarkan perundangundangan, dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah. Pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal terkandung tiga misi utama, yaitu (Barzelay, 1991) dalam Adi Sasana (2008).

Livingstone dan Charlton, dalam Suryantini (2001) mengemukakan bahwa desentralisasi keuangan pemerintah merupakan tujuan penting di banyak negara berkembang, dan lebih memungkinkan untuk dekat dengan masyarakat dan memberikan pelayanan yang perlu disediakan untuk masyarakat. Akibatnya masyarakat memiliki kesadaran untuk membayar pajak sebagai kontribusinya, karena jumlah yang mereka kontribusikan kepada pemerintah akan langsung terlihat hasilnya.

Desentralisasi fiskal diartikan sebagai pelimpahan wewenang dibidang penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat. Dengan terjadinya pelimpahan sebagian wewenang terhadap sumber-sumber penerimaan di daerah, diharapkan daerah-daerah dapat melaksanakan tugas-tugas rutin, pelayanan publik dan meningkatkan investasi yang produktif (*Capitalinvestment*) di daerahnya.

Menurut Bahl (1999) desentralisasi fiskal harus diikuti oleh kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak (*Taxing Power*). Secara teori adanya kemampuan pajak, maka pemerintah daerah akan memiliki sumber dana pembangunan yang besar. Pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah dapat berdampak positif yang akan digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur dan membiayai berbagai pengeluaran publik.

Di Indonesia, azas desentralisasi fiskal menjadi dasar dalam penerapan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yaitu suatu system pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004).

Belanja Modal. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, mengklasifikasikan belanja daerah sebagai Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Menurut PP No. 24 tahun 2005, Belanja Modal meliputi antara lain: (a) Belanja Tanah, (b) Belanja Peralatan dan Mesin, (c) Belanja Gedung dan Bangunan, (d) Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan, (e) Belanja Asset Tetap lainnya, (e) Belanja Asset Lainnya

Belanja Modal yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik mendorong peningkatan investasi. Peningkatan pemerintah daerah dalam Belanja Modal tersebut, diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo:2002). Peningkatan Belanja Modal untuk pembangunan infrastruktur ini diharapkan manfaatnya untuk masa yang akan datang, sehingga ada time lag dari x (tahun t) ke y (tahun $t+1$).

Dalam teori dinamika pertumbuhan Harrod Domard(Sumitro, 1994), menyatakan bahwa modal dalam suatu periode (t) menjadi sumber dasar bagi bertambahnya hasil produksi di periode yang menyusul (t+1). Dengan kata lain penambahan modal pada saat ini meningkatkan kemampuan berproduksi dan menambah pendapatan di masa datang (t+1). Peningkatan pendapatan tersebut disamping untuk konsumsi juga akan diinvestasikan kembali, sehingga semakin memperbesar kapasitas produksi. Hasil produksi yang semakin luas dinikmati pasar akan menyebabkan penerimaan daerah yang diperoleh dari pajak penjualan, pajak penghasilan serta pajak pertambahan nilai barang dan jasa semakin meningkat. Oleh daerah pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan sarana prasarana umum dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Kemampuan daerah untuk melakukan pendanaan atas kebutuhan daerah itu sendiri menunjukkan kemandirian daerah yang menjadi indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan otonomi daerah (Ari Yuniarti, 2008).

Fiscal Stress. Dongori (2006) menyatakan bahwa dampak diberlakukannya undang-undang otonomi daerah dan dikeluarkannya undang-undang No. 34 tahun 2000 yang membatasi pungutan pajak daerah dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap penerimaan daerah. Ketersediaan sumber-sumber daya potensial dan kesiapan daerah menjadi faktor penting keberhasilan daerah dalam era otonomi ini. Keuangan daerah, terutama pada sisi penerimaan bisa menjadi tidak stabil dalam memasuki era otonomi ini.

Sobel dan Holcombe dalam Andayani (2004) mengemukakan bahwa terjadinya krisis keuangan disebabkan tidak cukupnya penerimaan atau pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pengeluaran. Daerah-daerah yang tidak memiliki kesiapan memasuki era otonomi bisa mengalami hal yang sama, tekanan fiskal (*Fiscal Stress*) menjadi semakin tinggi dikarenakan adanya tuntutan peningkatan kemandirian yang ditunjukkan dengan meningkatnya penerimaan sendiri untuk membiayai berbagai pengeluaran yang ada.

Purnaninthesa (2006) membuktikan bahwa *Fiscal Stress* berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah Purnaninthesa (2006) menyimpulkan bahwa *Fiscal Stress* pada suatu daerah dapat menyebabkan motivasi bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya guna mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Penelitian lain yang dilakukan Dongori (2006) menunjukkan fakta empirik bahwa *Fiscal Stress* mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat ketergantungan daerah. Semakin tinggi tingkat *Fiscal Stress* maka ada terdapat upaya daerah untuk meningkatkan kemandiriannya, yaitu dengan cara mengoptimalkan potensi asli daerahnya, yang salah satunya tercermin pada pendapatan asli daerah.

Menurut Adi (2007), *Fiscal Stress* diukur berdasarkan realisasi penerimaan dibandingkan dengan nilai potensi pendapatan. Upaya pajak yang tinggi mencerminkan tingkat *Fiscal Stress* yang lebih besar, hal ini berarti bahwa permintaan untuk jasa tertentu melebihi sumber atau pendapatan yang ada. Menurut Sukanto R (1999), upaya pajak (*Tax Effort*) dapat dirumuskan:

$$\text{Fiscal Stress} = \text{Realisasi PAD} / \text{Potensi PAD}$$

Keterangan:

Fiscal Stress adalah Tekanan Keuangan (financial)

Realisasi PAD adalah Realisasi penerimaan sumber-sumber PAD

Potensi PAD adalah Target penerimaan sumber-sumber PAD

Kuncoro (2004) menyatakan bahwa pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai

sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).

Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu biasanya satu tahun, yang ditunjukkan dengan PDRB, baik atas harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar dimana dalam perhitungan ini digunakan tahun 2000.

Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan, dengan tujuan yang berbeda. Penghitungan PDRB atas harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi dari tahun ketahun, sedangkan penghitungan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing Propinsi/Kabupaten sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi Daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar Daerah. Untuk menghasilkan suatu barang atau jasa diperlukan barang lain yang disebut faktor produksi. Total nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (Regional) tertentu dalam waktu tertentu (satu tahun) dihitung sebagai Produk Domestik Regional Bruto (Joko Tri Haryanto, 2007)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

Menurut Sadono Sukirno (2005), Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat diartikan, nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu daerah dalam periode tertentu yang menjumlahkan semua hasil dari masyarakat daerah tersebut ditambah dengan masyarakat daerah lain yang bekerja di daerah tersebut, sehingga PDRB merupakan suatu ukuran untuk melihat aktivitas perekonomian suatu daerah.

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan orang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah. Dalam konsep makro dapat dianalogikan bahwa semakin besar PDRB yang diperoleh maka akan semakin besar pula potensi penerimaan daerah. Sehingga dengan adanya peningkatan PDRB, maka hal ini mengindikasikan akan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Saragih, 2003). Pendapat ini sejalan dengan Halim (2000) bahwa Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto (dalam Evie Adriani, 2008).

Kemandirian Keuangan Daerah. Menurut Halim (2005), ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada: (1) Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah otonomi harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan keuangan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. (2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, dimana pemerintah daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi. Daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya.

Menurut Musgrave dan Musgrave (1991), untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya diukur dengan derajat Desentralisasi Fiskal yaitu perbandingan PAD dengan Total Penerimaan Daerah (TPD). Semakin tinggi derajat Desentralisasi Fiskal suatu daerah menunjukkan semakin tinggi tingkat kemandirian daerah tersebut.

Menurut Booth (2000), kemandirian atau kemampuan fiskal diartikan sebagai proporsi total pendapatan provinsi dan kabupaten/kota yang diperoleh dari sumber-sumber diluar subsidi dari pemerintah pusat. Kemandirian fiskal merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data dan Pengujian Hipotesis. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
 Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linier berganda (*Multiple Linier Regression*). Hasil analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	41.423	4.932		8.399	.000
B.MODALt	1.253E-11	.000	.205	1.488	.143
FISCALSTRESS	1.676	3.070	.067	.546	.588
PDRB	1.892E-13	.000	.402	2.934	.005

a. Dependent Variable: KKD

Sumber: data diolah

Pada tabel 2 diperoleh persamaan regresi linear berganda antara variabel bebas dan variabel terikat, sebagai berikut:

$$Y = 41,423 + 1,253X_1 + 1,676X_2 + 1,892X_3 + e$$

Keterangan: Y adalah Kemandirian Keuangan Daerah; X_1 adalah Belanja Modal; X_2 adalah *Fiscal Stress*; X_3 adalah PDRB

Dari tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa konstanta dari persamaan di atas bernilai positif yakni 41,423. Hal ini berarti bahwa jika variabel bebas dianggap konstan, maka besarnya nilai kemandirian keuangan daerah bernilai sebesar 41,423.

Koefisien regresi untuk variabel bebas X_1 bernilai positif, menunjukkan hubungan fungsional antara Belanja Modal dengan Kemandirian Keuangan Daerah berbanding lurus atau searah (β_1 bernilai positif). Koefisien regresi variabel X_1 sebesar 1,253 mengandung

arti untuk setiap penambahan Belanja Modal (X_1) sebesar satu satuan akan menyebabkan meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah (Y) sebesar 1,253.

Koefisien regresi untuk variabel bebas X_2 bernilai positif, menunjukkan hubungan fungsional antara *Fiscal Stress* dan Kemandirian Keuangan Daerah berbanding lurus atau searah (β_2 bernilai positif), Koefisien regresi variabel X_2 sebesar 1,676 mengandung arti untuk setiap penambahan *Fiscal Stress* (X_2) sebesar satu satuan akan menyebabkan meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah (Y) sebesar 1,676.

Begitu juga dengan koefisien regresi untuk variabel bebas X_3 bernilai positif, menunjukkan hubungan fungsional antara PDRB dan Kemandirian Keuangan Daerah berbanding lurus atau searah (β_3 bernilai positif), Koefisien regresi variabel X_3 sebesar 1,892 mengandung arti untuk setiap penambahan PDRB (X_3) sebesar satu satuan akan menyebabkan meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah (Y) sebesar 1,892.

Pengujian Hipotesis. Uji F. Untuk menguji apakah Belanja Modal (X_1) Fiscal Stress (X_2) dan PDRB (X_3) secara bersama-sama mempengaruhi Kemandirian Keuangan (Y), dilakukan dengan menggunakan uji F. Hal ini dimaksudkan jika nilai koefisien regresi tidak sama dengan nol, maka variabel independennya mempunyai pengaruh terhadap variable dependen. Pengujian dengan persamaan regresi ini menggunakan tingkat keyakinan 95%. Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$$

Belanja Modal, *Fiscal Stress*, PDRB tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

$$H_1 : \beta_1, \beta_2 \text{ dan } \beta_3 \neq 0$$

Belanja Modal, *Fiscal Stress*, PDRB mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Untuk menguji hipotesis ini kriteria yang digunakan adalah kriteria uji:

$$H_0 \text{ diterima jika } F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$$

$$H_0 \text{ ditolak jika } F_{\text{hitung}} \geq F_{\text{tabel}}$$

$$F_{\text{tabel}} = F_{\alpha}; (df_1, df_2); df_1 = k-1, df_1 = 4 - 1 = 3 \quad df_2 = n - k, df_2 = 52 - 4 = 48$$

$$\text{Maka di peroleh } F_{\text{tabel}} = 2,80$$

Signifikansi variabel independen secara bersama-sama terhadap dependen juga dapat diketahui melalui nilai *p-value* (sig). Variabel independen secara bersama-sama dikatakan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen apabila nilai *p-value* (sig) lebih kecil dari alpha (*Confidence Interval*). Hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji F adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1918.652	3	639.551	6.112	.001 ^a
	Residual	5022.760	48	104.641		
	Total	6941.412	51			

a. Predictors: (Constant), PDRB, FISCALSTRESS, B.MODALt

b. Dependent Variable: KKD

Sumber: data diolah

Dari hasil uji F di atas menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 6,112 dan F_{tabel} sebesar 2,80. Karena F_{hitung} lebih besar daripada F_{tabel} , dan nilai *p-value* adalah 0.01 (sig) lebih kecil

dari alpha 0.05 (*Confidence Interval*), maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi secara keseluruhan adalah signifikan pada tingkat 5%, dimana H_0 ditolak dan H_1 diterima. Ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara Belanja Modal (lag t+1), *Fiscal Stress* dan PDRB terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Uji t. Pada uji statistik secara parsial dengan nilai t kritis (*Critical Value*) pada $df = (n - k)$, dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel bebas termasuk konstanta. Untuk menguji koefisien regresi parsial secara individu dari masing-masing variabel bebas akan dilakukan pengujian.

Untuk menguji diduga Belanja Modal (X_1), *Fiscal Stress* (X_2) dan PDRB (X_3) secara parsial mempengaruhi Kemandirian Keuangan (Y), dilakukan dengan menggunakan uji t. Adapun hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$H_0 : \beta_i = 0$,

Belanja Modal, *Fiscal Stress* dan PDRB secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

$H_1 : \beta_i \neq 0$,

Belanja Modal, *Fiscal Stress* dan PDRB secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Untuk menguji hipotesis ini kriteria yang digunakan adalah kriteria uji:

H_0 diterima jika $t_{hitung} < t_{tabel}$

H_0 ditolak jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$

$t_{tabel} = t_{\alpha} ; (df_1) ; df = n - k, df = 52 - 4 = 48$

Maka di peroleh $t_{tabel} = 2,010$

Variabel independen secara parsial dikatakan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai *p-value* (*sig*) lebih kecil dari alpha (*Confidence Interval*). Hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji t adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	41.423	4.932		8.399	.000
B.MODALt	1.253E-11	.000	.205	1.488	.143
FISCALSTRESS	1.676	3.070	.067	.546	.588
PDRB	1.892E-13	.000	.402	2.934	.005

a. Dependent Variable: KKD

Sumber: data diolah

Dari hasil uji t di atas menunjukkan bahwa nilai t_{tabel} sebesar 2,010 dan nilai t_{hitung} untuk Belanja Modal (lag t+1) sebesar 1,488. Karena $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 ada di daerah penerimaan, dan nilai *p-value* adalah 0.143 (*sig*) lebih besar dari alpha 0.05 (*Confidence Interval*), artinya hubungan dan pengaruh yang terjadi antara variabel Belanja Modal (lag t+1) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah adalah hubungan positif namun tidak signifikan. Hasil statistik t_{hitung} untuk *Fiscal Stress* sebesar 0,546 dan t_{tabel} sebesar 2,010. Karena $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 ada di daerah penerimaan, dan nilai *p-value* adalah 0.588 (*sig*) lebih besar dari alpha 0.05 (*Confidence Interval*), artinya

hubungan dan pengaruh yang terjadi antara variabel *Fiscal Stress* terhadap Kemandirian Keuangan Daerah adalah hubungan positif namun tidak signifikan.

Sedangkan t_{hitung} untuk PDRB sebesar 2,943 dan t_{tabel} sebesar 2,010. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ada di daerah penolakan, dan nilai *p-value* adalah 0.005 (*sig*) lebih kecil dari alpha 0.05 (*Confidence Interval*), artinya hubungan dan pengaruh yang terjadi antara variabel PDRB terhadap Kemandirian Keuangan Daerah adalah positif dan signifikan.

Koefisien Determinasi (R^2) dan Koefisien Korelasi (R). Dalam suatu penelitian mengenai hubungan antara variabel-variabel bebas dengan variabel terikat sering ingin diketahui seberapa kekuatan variabel-variabel bebas tersebut secara bersama-sama menerangkan perubahan pada variabel terikat. Koefisien korelasi R dan koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Dari tabel 5 terlihat bahwa koefisien korelasi (R) sebesar 0,526 yang menunjukkan hubungan antara Belanja Modal, *Fiscal Stress* dan PDRB dengan Kemandirian Keuangan. Koefisien determinasi (R^2) menggunakan *adjusted R square* sebesar 0,231, memberi pengertian bahwa besarnya Kemandirian Keuangan yang dapat dijelaskan oleh variabel Belanja Modal, *Fiscal Stress* dan PDRB adalah sebesar 23,1% sedangkan yang tidak dapat dijelaskan sebesar 76,9%.

Tabel 5. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.526 ^a	.276	.231	10.22941

a. Predictors: (Constant), PDRB, FISCALSTRESS, B.MODALt

b. Dependent Variable: KKD

Sumber: data diolah

Penyebab *adjusted R Square* kecil adalah disebabkan oleh kontribusi atau peran variable Belanja Modal, *Fiscal Stress*, PDRB terlalu kecil terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (KKD). Implikasi Kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah, berarti tidak bisa diharapkan dari ke 3 variabel tersebut. Lemahnya pengaruh ke 3 variabel terhadap Kemandirian Keuangan Daerah tersebut, maka rekomendasinya adalah disarankan mencari variabel lain yang dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Pembahasan terhadap arah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat adalah menggunakan uji korelasi. Kemudian dilakukan uji hipotesis untuk uji korelasi produk moment (*Pearson*).

Tabel 6. Koefisen Korelasi

		B.MODAL(t+1)	FISCALSTRESS	PDRB	KKD
B.MODAL (t+1)	Pearson	1	-.114	.442**	.375**
	Correlation				
	Sig. (2-tailed)		.421	.001	.006
	N	52	52	52	52
FISCALSTRESS	Pearson	-.114	1	-.025	.034
	Correlation				
	Sig. (2-tailed)	.421		.860	.811
	N	52	52	52	52

		B.MODAL(t+1)	FISCALSTRESS	PDRB	KKD
PDRB	Pearson	.442**	-.025	1	.491**
	Correlation				
	Sig. (2-tailed)	.001	.860		.000
	N	52	52	52	52
KKD	Pearson	.375**	.034	.491**	1
	Correlation				
	Sig. (2-tailed)	.006	.811	.000	
	N	52	52	52	52

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: data diolah

Berdasarkan hasil uji statistik hubungan antara Belanja Modal dengan Kemandirian Keuangan Daerah, angka koefisien korelasi adalah 0,375. Taksiran koefisien korelasi yang dikategorikan menurut metode Guilford, hasil ini menunjukkan bahwa korelasi antara Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah adalah **korelasi rendah**. Perhitungan korelasi tersebut menghasilkan angka positif, yang artinya memiliki hubungan searah. Hal ini maksudnya semakin baik Belanja Modal maka akan semakin baik Kemandirian Keuangan Daerah. Hubungan antara Belanja Modal dengan Kemandirian Keuangan Daerah adalah signifikan. Hal ini diketahui dari angka tingkat signifikan (*sig*) sebesar 0,006 yang berada dibawah alpha 0,05.

Berdasarkan hasil uji statistik hubungan antara *Fiscal Stress* dengan Kemandirian Keuangan Daerah, angka koefisien korelasi adalah 0,034. Taksiran koefisien korelasi yang dikategorikan menurut metode Guilford, hasil ini menunjukkan bahwa korelasi antara *Fiscal Stress* dan Kemandirian Keuangan Daerah adalah **korelasi sangat rendah**. Perhitungan korelasi tersebut menghasilkan angka positif, yang artinya memiliki hubungan searah. Hal ini maksudnya semakin baik Fiscal Stress maka akan semakin baik Kemandirian Keuangan Daerah. Dilihat dari hubungan antara Belanja Modal dengan Kemandirian Keuangan Daerah adalah tidak signifikan (tidak berarti). Hal ini diketahui dari angka tingkat signifikan (*sig*) sebesar 0,811 yang berada diatas alpha 0,05.

Berdasarkan hasil uji statistik hubungan antara PDRB dengan Kemandirian Keuangan Daerah, angka koefisien korelasi adalah 0,491. Taksiran koefisien korelasi yang dikategorikan menurut metode Guilford, hasil ini menunjukkan bahwa korelasi antara PDRB dan Kemandirian Keuangan Daerah adalah **korelasi sedang**. Perhitungan korelasi tersebut menghasilkan angka positif, yang artinya memiliki hubungan searah. Hal ini maksudnya semakin baik PDRB maka akan semakin baik Kemandirian Keuangan Daerah. Hubungan antara PDRB dengan Kemandirian Keuangan Daerah adalah signifikan (berarti). Hal ini diketahui dari angka tingkat signifikan (*sig*) sebesar 0,000 yang berada dibawah alpha 0,05.

Pengaruh Realisasi Belanja Modal, Fiscal Stress, PDRB Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil analisis pengaruh realisasi Belanja Modal (lag t+1), *Fiscal Stress*, PDRB terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di propinsi Kalimantan Timur, diperoleh koefisien korelasi (R) antara variabel independen terhadap variabel dependen secara keseluruhan sebesar 0,526 atau 52.6%, ini menunjukkan besarnya pengaruh hubungan antara Belanja Modal (lag t+1), *Fiscal Stress* dan PDRB terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Koefisien determinasi multiple (R^2) menggunakan *adjusted R square* adalah sebesar 0,231, hal ini berarti bahwa variabel Belanja Modal (lag t+1), *Fiscal Stress*, PDRB (variabel independen) mampu menjelaskan Kemandirian Keuangan Daerah (variabel dependen) adalah sebesar 23,1% sedangkan 76,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimodelkan dalam penelitian ini.

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan Uji F untuk menguji secara bersama – sama, menunjukkan bahwa Belanja Modal (lag t+1), *Fiscal Stress*, dan PDRB secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada tingkat keyakinan 95%, dimana nilai $F_{hitung} = 6,112$ lebih besar dari $F_{tabel} = 2,80$, dan nilai *p-value* adalah 0,01 (*sig*) lebih kecil dari alpha 0,05. Sehingga dari penelitian menunjukkan penerimaan hipotesis H_1 , dimana adanya pengaruh yang signifikan dari variabel-variabel independen (Belanja Modal, *Fiscal Stress*, PDRB) terhadap variabel dependen (Kemandirian Keuangan Daerah).

Realisasi Belanja Modal untuk infrastruktur ini diharapkan manfaatnya untuk jangka panjang. belanja modal untuk infrastruktur ini, manfaat kedepannya dapat mempermudah dalam menggali potensi daerah dari berbagai sektor, sehingga produktifitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan menjadi pemicu dalam peningkatan pendapatan asli daerah, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kemandirian daerah. Daerah yang mudah menggali potensi daerah maka *Fiskal Stress* yang terjadi rendah, artinya dengan adanya belanja modal untuk infrastruktur ini, daerah makin mudah untuk menggali potensi daerah, sehingga mudah merealisasikan pendapatan asli daerah. Infrastruktur yang memadai juga dapat meningkatkan realisasi PDRB, karena peningkatan realisasi PDRB menunjukkan bahwa daerah menghasilkan produksi dari potensi ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan Bagi hasil pajak bukan pajak. Kalau Pendapatan Asli Daerah meningkat dan bagi hasil bukan pajak meningkat maka akan meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah.

Hal ini selayaknya menjadi pertimbangan bagi pemerintah kabupaten/kota di propinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan kemandirian keuangan, karena ternyata ketiga variabel independen di atas secara bersama-sama dapat mempengaruhi peningkatan kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di propinsi Kalimantan Timur.

Pengaruh Realisasi Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Untuk pengujian pengaruh secara parsial atau pengujian masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan melalui uji t. Hasil uji t pada tingkat signifikansi 5%, secara statistik menunjukkan bahwa Belanja Modal untuk belanja infrastruktur terhadap Kemandirian Keuangan Daerah hubungannya positif namun tidak signifikan. Hubungan positif ini mengandung makna bahwa peningkatan Belanja Modal akan berdampak terhadap peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah, tetapi kenaikan Belanja Modal ini tidak signifikan, artinya secara statistik tidak memberikan kontribusi kepada Kemandirian Keuangan Daerah.

Belanja Modal untuk infrastruktur manfaatnya baru bisa dirasakan untuk jangka panjang, sehingga dengan data dengan waktu terbatas, belum memberikan kontribusi terhadap kemandirian keuangan daerah. Dalam hal penyerapan belanja modal untuk infrastruktur ini, idealnya belanja modal untuk infrastruktur yang baik diharapkan dapat mempermudah dalam menggali potensi daerah dari berbagai sektor, sehingga produktifitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan menjadi pemicu dalam peningkatan pendapatan asli daerah, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kemandirian daerah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Abdullah dan Halim (2003), yang menunjukkan adanya pengaruh yang kuat belanja daerah terhadap peningkatan PAD. Penelitian Adi (2006) menyatakan bahwa belanja pembangunan memberikan pengaruh signifikan dan positif terhadap PAD. Hasil studi yang dilakukan Wong (2004), menyatakan bahwa dalam pembangunan daerah diperlukan berbagai fasilitas modal. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan penerimaan daerah. Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas ini akan berujung pada peningkatan kemandirian daerah.

Hasil Penelitian Abdullah dan Halim, Wong serta Adi menjelaskan bahwa belanja pembangunan yang dimaksud adalah keseluruhan belanja modal yang telah direalisasikan oleh daerah. Sedangkan pada penelitian ini meneliti belanja modal yang hanya digunakan untuk belanja jalan, jaringan dan lain-lainnya yang mempunyai realisasi yang kecil dari keseluruhan belanja modal. Belanja modal yang dimaksudkan dirasakan manfaatnya beberapa tahun mendatang, karena membangun infrastruktur juga membutuhkan waktu yang lama, sehingga tidak terlalu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dan dapat dilihat masih rendahnya PAD yang diperoleh oleh daerah.

Pengaruh Realisasi *Fiscal Stress* Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Menurut hasil statistik hubungan dan pengaruh yang terjadi antara variabel *Fiscal Stress* dan Kemandirian Keuangan Daerah adalah positif namun tidak signifikan. Hubungan positif maksudnya bahwa *Fiscal Stress* mempunyai hubungan yang searah dengan Kemandirian Keuangan Daerah, namun secara statistik *Fiscal Stress* tidak memiliki kontribusi terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Fiscal Stress secara statistik tidak memberikan kontribusi terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, dikarenakan daerah mengalami kesulitan untuk merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah yang ingin dicapainya. Rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dicapainya, berkaitan dengan rendahnya keinginan daerah untuk menggali potensi daerah. Hal lain penyebabnya adalah besarnya BHPBP yang diperoleh daerah Kabupaten/Kota di propinsi Kalimantan Timur, karena BHPBP juga merupakan bagian dari potensi daerah, maka dengan sendirinya akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Hasil penelitian Bambang Haryadi (2002) menunjukkan bahwa *Fiscal Stress* berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Shamsud dan Akoto (2004) menyatakan bahwa pada saat *Fiscal Stress* tinggi, pemerintah cenderung menggali potensi penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan daerahnya. Penelitian Purnaninthesa (2006) juga membuktikan bahwa *Fiscal Stress* berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Purnaninthesa (2006) menyimpulkan bahwa *Fiscal Stress* pada suatu daerah dapat menyebabkan motivasi bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya guna mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Bambang Haryadi (2002), Shamsud dan Akoto (2004) serta Purnaninthesa (2006), Ketika daerah kesulitan dalam merealisasikan PAD maka mengakibatkan *Fiscal Stress* yang tinggi. Sebaliknya ketika daerah mudah dalam merealisasikan target PAD nya maka dikatakan terjadi fiskal yang

rendah, sehingga *Fiscal Stress* ini dapat menyebabkan terjadinya kenaikan atau penurunan APBD. Terjadinya kenaikan atau penurunan realisasi PAD dalam APBD akan berdampak kepada Kemandirian Keuangan Daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi PAD yang ditargetkan oleh masing-masing daerah Kabupaten/Kota di propinsi Kalimantan Timur masih rendah. Penyebabnya adalah tingginya bagi hasil dari pusat berupa BHPBP yang diterima oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini berakibat pada kurangnya upaya dan motivasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Daerah Kabupaten/Kota di propinsi Kalimantan Timur memang memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa banyak, sehingga BHPBP yang dialokasikan bagi hasilnya besar untuk daerah. Kekayaan sumber daya alam tersebut, lambat laun akan habis digarap dan dieksploitasi, akibatnya adalah pada masa-masa akan datang penerimaan BHPBP nantinya akan berkurang, berkurangnya alokasi BHPBP maka akan mengakibatkan kemandirian keuangan daerah akan menurun.

Untuk kedepannya, pemerintah daerah diharapkan memperhatikan juga aspek *Fiscal Stress*, karena berpengaruh secara tidak langsung terhadap penerimaan daerah. Pemerintah sudah harus mengantisipasi dan berinovasi dengan membuat perubahan dalam upaya meningkatkan penerimaan daerahnya, misalnya membuat daerah pariwisata untuk daerah yang memiliki potensi alam yang indah. sehingga ketika dikunjungi oleh wisatawan, nantinya akan menghasilkan penerimaan buat daerah.

Pengaruh Realisasi PDRB Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Menurut hasil secara statistik hubungan dan pengaruh yang terjadi antara variabel PDRB dan Kemandirian Keuangan adalah hubungan positif dan berpengaruh signifikan. Hubungan positif maksudnya bahwa PDRB mempunyai hubungan yang searah dengan Kemandirian Keuangan Daerah dan berpengaruh signifikan maksudnya bahwa PDRB memiliki kontribusi terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, karena $t_{hitung} > t_{tabel}$.

Peningkatan realisasi PDRB menunjukkan bahwa daerah menghasilkan produksi dari potensi ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan bagi hasil bukan pajak. Kalau Pendapatan Asli Daerah meningkat dan bagi hasil bukan pajak meningkat maka akan meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Evi Adriani (2008), yang menyimpulkan bahwa PDRB, berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sebagai indikator Kemandirian Keuangan Daerah.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa PDRB dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, Peningkatan barang dan jasa yang diproduksi oleh 9 (sembilan) lapangan usaha dalam PDRB, orang yang terlibat dalam lapangan usaha tersebut akan memperoleh pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka akan semakin tinggi pula kemampuan orang untuk membayar berbagai pungutan pemerintah daerah, sehingga semakin tinggi pungutan yang diterima oleh pemerintah daerah, mengakibatkan semakin tinggi pendapatan yang diterima daerah, sehingga semakin tinggi pendapatan asli daerah maka makin tinggi kemandirian keuangan daerah. Pemerintah daerah diharapkan mempunyai pemahaman terhadap PDRB, bahwa proses terjadinya kenaikan PAD ditentukan oleh berbagai aspek, dan adanya saling keterkaitan berbagai sektor ekonomi.

PENUTUP

Penelitian ini bertujuan menguji diduga realisasi Belanja Modal, *Fiscal Stress*, PDRB berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Timur. Pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan analisis regresi berganda (*Multiple Regression Analysis*) dengan menggunakan data panel.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: **Pertama.** Hasil pengujian terhadap hipotesis-hipotesis pada tingkat signifikansi 0,05%, menunjukkan bahwa secara simultan variabel Belanja Modal ($\text{lag } t+1$), *Fiscal Stress*, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kemandirian Keuangan Daerah. Ketiga variabel independen tersebut dapat menjelaskan Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 23,1%, sedangkan 76,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimodelkan dalam penelitian ini. Perubahan variabel-variabel independen tersebut mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah secara bersama-sama secara signifikan karena variabel-variabel independen tersebut termasuk faktor yang dapat mendorong peningkatan Pendapatan Daerah Sendiri, sebagai indikator Kemandirian Keuangan Daerah. **Kedua.** Hasil pengujian secara parsial variabel Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, hasil statistik menyimpulkan bahwa hubungan yang terjadi antara Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah adalah hubungan positif namun tidak signifikan. Hubungan positif namun tidak signifikan maksudnya bahwa hubungan antara belanja modal untuk infrastruktur dengan kemandirian keuangan daerah adalah searah, namun tidak berarti. Kenaikan Belanja Modal ini akan dirasakan manfaatnya untuk jangka panjang, sehingga dibutuhkan waktu untuk memperoleh manfaatnya. **Ketiga.** Pengujian secara parsial variabel *Fiscal Stress* terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, hasil statistik menyimpulkan bahwa hubungan yang terjadi antara *Fiscal Stress* dan Kemandirian Keuangan Daerah adalah hubungan positif namun tidak signifikan. Hubungan positif namun tidak signifikan maksudnya bahwa hubungan *Fiscal Stress* dengan Kemandirian Keuangan Daerah adalah searah, namun tidak berarti. **Keempat.** Untuk variabel Belanja Modal dan *Fiscal Stress*, secara statistik diharapkan kedepannya hubungan dengan Kemandirian Keuangan Daerah adalah positif dan signifikan. Hal ini karena akselerasi tiap daerah berbeda-beda, dampak kedua variabel itu terhadap Kemandirian Keuangan Daerah bersifat jangka panjang. **Kelima.** Pengujian secara parsial variabel PDRB terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, hasil statistik menyimpulkan bahwa hubungan yang terjadi antara PDRB dan Kemandirian Keuangan Daerah adalah hubungan positif dan signifikan. Sehingga disarankan untuk meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah perhatian pemerintah daerah lebih difokuskan kepada peningkatan PDRB.

Saran. Dari hasil studi empiris yang telah dilakukan, dapat dibuat saran dan kebijakan untuk pihak-pihak terkait sebagai berikut: **Pertama.** Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada 13 daerah kabupaten dan kota pada Propinsi Kalimantan Timur, yang Laporan Keuangannya diaudit 4 tahun berturut-turut oleh BPK RI selama kurun waktu tahun 2006-2009, sehingga generalisasi hasil temuan dan rekomendasi penelitian ini kurang dapat diberlakukan bagi seluruh daerah di Indonesia. Adanya *time lag* dan akselerasi tiap daerah berbeda-beda, sehingga manfaatnya baru diperoleh pada periode mendatang. Kedepannya juga diharapkan B. Modal dengan Kemandirian Keuangan Daerah hubungannya positif dan signifikan. Untuk penelitian mendatang dapat memperluas atau menambah sampel penelitian atau seluruh Indonesia dengan periode pengamatan yang lebih panjang agar menghasilkan data yang lebih komprehensif dan akurat. **Kedua.** Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan untuk mengambil jangka waktu yang lebih lama untuk diteliti dan juga lebih banyak menggunakan variabel

independent, diluar variabel independent yang sudah diteliti untuk melihat variabel lain yang mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah. **Ketiga.** Kepada Pemerintah Daerah, dalam upaya peningkatan kapasitas fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah agar memperhatikan aspek ekonomi secara makro, karena peningkatan faktor – faktor produksi dalam menghitung PDRB mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap peningkatan PAD. Perlu juga upaya manajemen PAD yang lebih baik melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sehingga upaya peningkatan PAD tersebut menjadi maksimal, sehingga akan meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Halim, (2007). Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Kedua, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Abdullah, Syukriy., & Halim, Abdul. (2004). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Yogyakarta: *Jurnal Ekonomi STEI* No.2/Th. XIII/25/ April-Juni 2004: 90-109.
- Adi, Priyo Hari. (2006). Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan Dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). *SNA IX*, Padang 23-26 Agustus 2006.
- _____. (2008). Hubungan Antara Disparitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah: Studi pada Kabupaten dan Kota Se Jawa-Bali.
- Adi Sasana, (2008). Pengaruh hubungan fiskal Pemerintah Pusat – Daerah terhadap PDRB Kabupaten Klaten. *Thesis* MEP tidak dipublikasikan. UGM Yogyakarta.
- Andayani. W, (2004). Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*. Vol 05, (1), Februari.
- Ari Yuniarti, (2008). Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Perkapita, Tingkat Investasi dan Tingkat Industrialisasi terhadap Kemandirian Daerah. *Thesis* MEP tidak dipublikasikan. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Budi. S & Priyo Hari Adi, (2008). Pengaruh Fiscal Stress terhadap pertumbuhan PAD dan Belanja Modal. *Simposium Nasional Riset & Ekonomi Bisnis Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTİK)*. Semarang
- Bird, Richard M., Vaillancourt, Francois, (2000). Desentralisasi Fiskal di Negara- Negara Berkembang, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bastian, Indra. (2001). Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Berenson. L. D.M Levine and T.C. Krehbiel, (2006). Basic Business Statistic, 10 th ed, Upper Sadlle River, Nerw Jersey, Pearson Education
- Boot, Anne, (2008). Upaya-upaya Untuk mendesentralisasikan kebijakan Perpajakan , Masalah Kemampuan Perpajakan, Usaha Perpajakan dan Perimbangan Keuangan, Hubungan Pusat dan daerah dalam Pembangunan (Rangkuman Collin Mc Andrews dan Icksul Amal) PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Davey. Keneeth.J, (1998). Pembiayaan Pemerintahan Daerah. Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga (Terjemahan Amanullah dkk) UI Press. Jakarta

- Devas, Nick., (1989). *Kuangan Pemerintahan Daerah Indonesia*, Penerbit UI-Press, Jakarta.
- Darwanto & Yustikasari, Yulia. (2007). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *SNA X*, Makassar 26-28 Juli 2007.
- Dwi Priyatno. (2009). *SPSS untuk Analisis Korelasi, Regresi, dan Multivariate*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Dongori, Dessy Patricia F. (2006). Pengaruh Tekanan Fiskal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga
- Erna Rositah, (2009). Kajian Kemiskinan Masyarakat Desa Sekitar Hutan di Kabupaten Malinau Propinsi Kalimantan Timur. *Center For International Forestry Research (CIFOR)*. No. 14.
- Elia Radianto, (1997). Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II suatu studi di Maluku, *Jurnal Prisma* Vol 3.
- Evi Adriani, (2008). Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk Terhadap Peningkatan PAD pada pemerintah daerah kabupaten Merangin. *Jurnal Universitas Batang Hari*, Jambi Volume 8 (2).
- Gujarati, Damodar, (1991). *Ekonometrika Dasar*. Jakarta, Penerbit Airlangga.
- Ghozali, Imam. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
- Guilford, J.P, (1956). *Fundamental Statistic in Psychology and Education*, New York, Mc. Graw Hill.
- Halim, Abdul. (2001). Analisis deskriptif Pengaruh Fiscal Stress pada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa tengah. *Kompak STIE Yogyakarta Empat*.
- _____. (2002). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- _____. (2004). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Haryadi , Bambang. (2002). Analisis Pengaruh Fiscal Stress terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menghadapi Otonomi Daerah. *Simpodium Nasional Akuntansi V*, Semarang.
- Holtz-Eakin, Douglas, Harvey S. Rosen, & Schuyler Tilly. (1993). Intertemporal Analysis of state in local government spending: Theory and test. *Working Paper* No. 4261.
- Joko Tri Haryanto, (2007). Kemandirian Daerah Sebuah Perspektif dengan metoda Path Analysis, *Jurnal kajian Kemandirian daerah*. Jakarta
- Kuncoro, Mudrajat. Ph.D. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perekonomian, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Khusaini, Muhammad, (2006). *Ekonomi Publik, Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah Malang*. BPFE Unibraw.
- Litvack, Jennie, Seddon., Jessica, (1999). *Decentralization Briefing Notes*, The World Bank, Washington, D.C.
- Lin, Justin Yifu & Liu, Zhiqiang. (2000). Fiscal Decentralization and Economic Growth in China. *Economic Development and Cultural Change*, Oct 2000, ABI/INFORM Global.

- Livingstone and Charlton, (1998). Raising Local District Revenues Throught Direct Taxation in A Low income Developing Country. University of Chicago Press, Cambridge
- Mangkoesebroto, Guritno. (2001). Ekonomi Publik. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Mankiw, N. Gregory. (2007). Makroekonomi. Alih bahasa Fitria Liza, SE dan Imam Nurmawan, SE. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- _____. (2004). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Musgrave, Richard A., (1985), The Theory of Public Finance. International Student Edition. Kogakusha Company Ltd., Tokyo.
- Musgrave, Richard .A., & Peggy B, Musgrave. (1991). Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Nazir, Mohammad. (1999). Metode Penelitian Bisnis. Yogyakarta: BPFE
- Nur Indriantoro & Bambang Supomo, (1999). Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta: BPFE.
- Nurlaila, (2009). Pengaruh Belanja Operasional dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan daerah pemekaran di Indonesia. *Tesis* tidak dipublikasikan. Program Magister Akuntansi Universitas Padjadjaran.
- Pudji Suprajitno, (2003). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian Kemandirian Fiskal Daerah (studi kasus di Kabupaten Banjar Negara), *Tesis* tidak dipublikasikan, UNDIP Semarang.
- Purnaninthesa. Anggita. (2006). Analisis Pengaruh fiscal stress terhadap tingkat Pembiayaan Daerah, Mobilisasi Daerah, Ketergantungan dan Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Menghadapi Otonomi Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah). Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga
- _____. (2007). Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.
- _____. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. (2005). Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
- _____. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- _____. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Rosen, Harvey (ed.), (1988). Fiscal Federalism. *National Bureau of Economics Research, University of Chicago Press*, Cambridge.
- Sidik, Machfud. (2002). Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia). Yogyakarta.
- Sugiyono, M. (2002). Metode Penelitian Kuantitatif. Alfabeta, Bandung.
- Sukanto Reksohadiprojo, (1999). Ekonomika Publik, Edisi Pertama, BPFE Yogyakarta.
- Suryantini Budi Astuti, (2001). Kemandirian Kota Surakarta dilihat dari posisi PAD dan kemungkinan pengembangannya. *Tesis* MEP tidak dipublikasikan, UGM Yogyakarta.
- S. Tangkilisan, Hessel Nogi, (2007). Manajemen Publik, Grasindo, Jakarta

- Wong, John D. (2004). The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*. Fall. 16.3. 799-816
- Wiley, (2006). Metodologi Penelitian Untuk Bisnis Buku I Terjemahan Uma Sekaran) Jakarta: PT Salemba Empat.
- Wiley (2006). Metodologi Penelitian Untuk Bisnis Buku II (Terjemahan Uma Sekaran). Jakarta. PT. Salemba Empat
- Wiryo, (2006). Analisis perbandingan Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan PAD sebelum dan Seudah otonomi Daerah, *Skripsi* tidak dipublikasikan, Universitas Padjadjaran.
- Yustika, Ahmad Erani. (2008). Desentralisasi Ekonomi di Indonesia: Kajian Teoritis dan Realitas Empiris. Malang: Bayumedia Publishing.